

ABSTRAK

Tanah merupakan kebutuhan fundamental manusia yang tidak bisa dipisahkan sejak manusia lahir hingga akhir hayatnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian sengketa sertipikat ganda hak milik atas tanah dan faktor penyebab terjadinya sengketa sertipikat ganda di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara yuridis empiris, berupa penelitian tentang pengaruh berlakunya hukum positif terhadap masyarakat dalam pemecahan sengketa tanah.

Banyaknya kasus pertanahan khususnya mengenai sengketa sertipikat ganda tidak hanya meresahkan masyarakat tetapi juga mempengaruhi kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai institusi yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan administrasi pertanahan. Overlapping atau tumpang tindih terhadap hak atas tanah adalah ketika terbit dua sertipikat atau lebih yang tumpang tumpang tindih satu dengan yang lainnya sehingga bagian yang tumpang tindih tersebut merupakan sertipikat ganda, sedangkan sertipikat ganda mempunyai dua sertipikat atau lebih dimana objeknya sama, baik sebagian atau seluruhnya tetapi subjeknya tidak harus selalu sama.

Proses pelaksanaan penyelesaian sengketa Sertipikat Ganda Hak Milik Atas Atas yang oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional kota Semarang dilakukan dengan proses mediasi yang merupakan proses penyelesaian kasus pertanahan berdasarkan prinsip *win-win solution* atau jalur damai. Hasil mediasi sengketa sertipikat ganda hak milik atas tanah ini sepakat dan bersedia melepaskan HGB No. 1147/Manyaran secara keseluruhan untuk dimatikan dari dokumen pendaftaran tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Sertipikat Ganda

ABSTRACT

Land is fundamental human need that can not be separated since the human birth until the end of his life. The purpose of this research is to know the implementation of the dispute settlement of the double certificate of property rights on the land and the factor causing the occurrence of multiple certificate dispute in the Office Of National Land Agency Of Semarang. This research is done with empirical juridical approach, in the form of research about the influence of the enactment of positive law to society in solving land dispute.

There much the land affairs case, especially concerning the dispute over the double certificate not only disturbs the community but also affects the performance of the Nasional Land Agency (BPN) as an institution that has the duty and outhority to carry out land administration. Overlapping of land right is when two or more certificates overlap with each other so that the overlapping portion is a double certificates, whereas a double certificates has two or more certificates in which the object is the same, either partially or entirely but the subject does not have to be the same.

The process of execution of the dispute resolution of dpligate upper case of upper up which by The Office Of National Land Agency Of Semarang is done by mediation process which is the process of settling land case based on the principle of win-win solution or peace line. The result of the dispute mediation dispute over lan ownership agrees and is willing to release HGB No. 1147/Manyaran in its entirety to be shut off from land registration document at The Office Of The National Land Agency Of Semarang.

Keywords: The Settlement Of Dispute, Double Certificates